



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : IRMANTASIR
NIK : 1275041009630002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 2 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRMANTASIR
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 213032

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.010.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/96 m2 di AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/95 m2 di Toba Samosir, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	103.500.000
1. MOTOR, VIAR SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, VIAR SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS/ XENIA VVTI Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z 1 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.808.529
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.126.308.529
III. HUTANG	Rp.	157.867.727
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	968.440.802

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.